



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

POLICY BRIEF

PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI SEKOLAH SIAGA BENCANA

Pendidikan adalah sektor strategis yang dapat membentuk mental-spiritual generasi muda Indonesia menjadi generasi yang tangguh menghadapi bencana. Generasi tangguh bencana penting dalam kaitannya dengan kondisi alam Indonesia yang rentan terhadap berbagai bentuk bencana. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya apabila dilihat dari aspek geografis, geologis, hidrologis, klimatologis, dan demografis merupakan daerah yang rawan terhadap ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan wabah penyakit. Oleh sebab itu, sekolah sebagai pusat pendidikan dituntut tidak hanya harus mampu memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga bekal keterampilan untuk kelangsungan hidup. Kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian dari keterampilan untuk kelangsungan hidup yang amat dibutuhkan bagi setiap siswa sekolah.

Bencana dan Pendidikan di Sekolah

Hingga saat ini belum banyak catatan bencana yang terjadi pada jam-jam sekolah di Indonesia. Namun, berdasarkan pembelajaran gempa bumi yang terjadi di Pakistan pada tahun 2005 dan juga gempa bumi yang terjadi di Cina pada tahun 2008 dapat memberi gambaran bahwa ketika gempa bumi terjadi pada jam sekolah, korban paling banyak adalah dari kalangan anak-anak. Hal ini berarti siswa sekolah merupakan salah satu kelompok yang rentan ketika bencana terjadi. Kondisi ini juga dipertegas dari hasil kajian LIPI-UNESCO-ISDR (2006) yang menunjukkan bahwa komunitas sekolah termasuk dalam kelompok rentan yang memiliki kesiapsiagaan yang masih minim. Siswa sekolah yang masuk dalam kelompok rentan terhadap bencana menambah daftar panjang penduduk lainnya yang juga rentan terhadap bencana yaitu orang tua, anak-anak, perempuan, orang buta huruf, difabel dan orang yang memiliki status sosial ekonomi rendah (Tierney, Lindell, & Perry, 2001). Untuk itu, dalam manajemen bencana perlu adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui kehadiran sekolah siaga bencana. Keberadaan sekolah siaga bencana merupakan salah satu bentuk membangun kapasitas adaptif dari warga negara untuk menuju penduduk yang tangguh bencana (Kusumasari, 2015)

Konsep siaga bencana berbasis sekolah mengandung arti bahwa sekolah harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan melalui penguatan pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan tentang tanggap darurat, sistem peringatan dini dan memobilisasi sumber daya sekolah pada kondisi sebelum, sesaat dan sesudah bencana (Mulyadi dkk, 2010). Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah menjadi penting untuk dilakukan baik secara struktural maupun nonstruktural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap bencana di sekolah. Sekolah-/madrasah dituntut menghadirkan situasi sekolah yang aman dan nyaman dari bencana melalui berbagai upaya baik struktural maupun non struktural.

Bagaimana Pengarusutamaan PRB dilakukan di Sekolah?

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) dapat dilakukan oleh sekolah dalam bentuk menciptakan pengetahuan, sikap dan tindakan dalam bentuk adanya kebijakan sekolah/madrasah mengenai perencanaan kesiapsiagaan dan mobilisasi sumberdaya.

PENGARUSUTAMAAN PRB MELALUI SEKOLAH SIAGA BENCANA

PARAMETER

PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN

INDIKATOR

- Tersedianya pengetahuan mengenai bahaya (jenis bahaya); Kerentanan; Kapasitas; Risiko dan sejarah bencana yang terjadi dilingkungan sekolah atau daerahnya.
- Tersedianya pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan
- untuk mengurangi risiko bencana di sekolah/madrasah
- Keterampilan warga sekolah/madrasah termasuk anak dalam menerapkan rencana aksi sekolah/madrasah aman
- Terlaksananya Sosialisasi mengenai pengetahuan PRB, Sekolah/madrasah Aman dari bencana dan kesiapsiagaan kepada warga sekolah/madrasah termasuk anak.
- Terlaksananya pelatihan pengintegrasian PRB ke dalam KTSP.
- Terlaksananya kegiatan simulasi drill secara berkala di sekolah/madrasah dengan melibatkan masyarakat sekitar.

PARAMETER

KEBIJAKAN SEKOLAH/ MADRASAH

INDIKATOR

- Adanya kebijakan, Kesepakatan dan/atau peraturan sekolah/madrasah yang mendukung upaya penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana.
- Tersedianya akses bagi seluruh komponen sekolah/madrasah terhadap informasi, pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal PRB (materi acuan, ikut serta dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore murid, dsb.)

PARAMETER

PERENCANAAN KESIAPSIAGAAN

INDIKATOR

- Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah/ madrasah termasuk anak
- Tersedianya rencana aksi sekolah/madrasah dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana).
- Tersedianya Sistem Peringatan Dini yang dipahami seluruh warga sekolah/ madrasah
- Adanya Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Sekolah/ madrasah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah/ madrasah
- Adanya peta evakuasi sekolah/madrasah dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah/madrasah termasuk anak berkebutuhan khusus
- Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi/shelter terdekat dengan Sekolah/madrasah, disosialisasikan kepada seluruh warga Sekolah/madrasah dan orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.
- Adanya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah/madrasah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga termasuk anak sekolah/madrasah

PARAMETER

MOBILISASI SUMBER DAYA

INDIKATOR

- Jumlah dan jenis perlengkapan, suplai dan kebutuhan dasar pasca bencana yang dimiliki sekolah/ madrasah.
- Adanya Satgas sekolah/madrasah aman yang melibatkan perwakilan peserta didik secara individu maupun kelompok dalam koordinasi OSIS
- Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota/kabupaten dengan pihak-pihak terkait setempat (seperti perangkat desa/kelurahan, kecamatan, BPBD, dan lembaga pemerintah lainnya).
- Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan keamanan sekolah/ madrasah secara rutin (menguji atau melatih kesiapsiagaan sekolah/madrasah secara berkala).

Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana

Apa Tantangan Pengarusutamaan PRB di Sekolah?

Pendidikan sadar bencana sangat potensial untuk diterapkan di sekolah dengan mempertimbangkan positifnya persepsi guru serta kemudahan implementasi. Dari berbagai potensi yang dimilikinya, sekolah sangat potensial baik dari sisi sumberdaya lingkungan, SDM, potensi dan dukungan masyarakat termasuk sistem pembelajaran yang memungkinkan proses integrasi pembelajaran kebencanaan (Biro Adpem dan PSBA, 2012). Selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Tim Jaringan Penelitian Provinsi DIY tahun 2012 ditemukan bahwa sebagian besar sekolah yang diwawancara memiliki persepsi positif tentang keberadaan sekolah sadar bencana.

Pihak sekolah menyadari bahwa SSB efektif dalam meningkatkan kondisi pembelajaran yang lebih nyaman khususnya untuk mengurangi resiko dampak lingkungan negatif di masa mendatang. Namun demikian, tantangan dalam pengarusutamaan PRB ini di lingkungan sekolah adalah masih banyaknya sekolah-sekolah di DIY yang bangunannya secara fisik masih rentan terhadap bencana, belum ada kebijakan sekolah untuk mengembangkan kurikulum pembelajaran pendidikan sadar bencana, sekolah belum merencanakan implementasi sekolah sadar bencana berbasis PRB serta kekhawatiran bahwa kebijakan pengarusutamaan ini akan menambah beban mengajar guru. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya, termasuk sumber daya keuangan seperti terungkap dalam FGD dengan BPBD Provinsi DIY pada 23 Maret 2017.

"Terkait dengan penyelenggaraan SSB, Sekolah yang mengajukan ke BPBD banyak, tapi kami dalam 1 tahun hanya mampu menggarap 6 sekolah. Dari pengembangan dan pembentukan butuh waktu 2 tahun, dengan sosialisasi 2 hari, pelatihan penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan PRB."

Rekomendasi untuk Menerapkan Pengarusutamaan PRB di Sekolah

1 Membangun Kurikulum yang Terintegrasi dengan Pengetahuan Kebencanaan

Materi tentang kesiapsiagaan bencana dapat dijadikan sebagai muatan lokal, maupun berintegrasi dengan mata pelajaran yang sudah ada. Pengintegrasian muatan atau pengetahuan tentang kebencanaan dapat dilakukan melalui integrasi dalam mata pelajaran atau kurikulum, menjadikan sebagai bagian dari muatan lokal, pengembangan diri, mengagendakan program simulasi atau pelatihan sebagai kegiatan rutin atau tahunan sekolah (seperti Masa Orientasi Sekolah), integrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, pemasangan rambu atau ornamen sekolah yang mendukung peningkatan pengetahuan kebencanaan dan melaksanakan pelatihan kepada guru maupun siswa.

2 Menetapkan Satgas Tanggap Bencana di Sekolah

Sekolah perlu menerapkan satgas tanggap bencana yang bertugas memberikan komando terkait instruksi bencana, misalnya perlu adanya kesepakatan tentang proses evakuasi apabila ada kejadian bencana. Selain itu juga perlunya mendapatkan dukungan dari Dewan Sekolah sebagai bukti dukungan penuh atau komitmen untuk melembagakan pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah.

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sekolah perlu terus melakukan peningkatan kapasitas kepada warga sekolah melalui pendidikan maupun sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh warga sekolah. Latihan simulasi mengenai cara menghadapi bencana serta proses evakuasi perlu dilakukan secara berkala melalui koordinasi dengan BPBD.

4 Penetapan Kebijakan Sekolah akan adanya Protap, Sistem Peringatan Dini dan Penyusunan Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi dan Lokasi Bencana

a. Penetapan Protap

Sekolah perlu menetapkan prosedur tetap sekolah (protap) yang berisi deskripsi dan prosedur dalam tahapan yang disetujui, tentang siapa yang melakukan apa, kapan, dimana, dan bagaimana yang kemudian digunakan, dilaksanakan dan dijalankan dengan benar dengan terkoordinasi pada saat darurat kebencanaan (Mulyadi dkk, 2010). Dokumen protap ini berisi landasan hukum, visi dan misi, kebijakan sekolah, kerentanan dan kapasitas sekolah, komponen sekolah yang terlibat, kelembagaan sekolah, Gugus Siaga Bencana dan Tupoksi, Panduan Simulasi (termasuk skenario simulasi), Program Sekolah dan Rencana Aksi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan termasuk lampiran protap yang akan berisikan uraian rinci siapa yang melakukan apa, kapan, dimana dan bagaimana.

b. Penetapan Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan bencana yang perlu disepakati seperti alat tanda bahaya yang digunakan, penyusunan rencana tanggap darurat bencana yang semua ini harus dipahami seluruh warga sekolah.

c. Penyusunan Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi dan Lokasi Bencana

Sekolah perlu menyusun peta evakuasi sekolah dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga perlu disepakati lokasi evakuasi berikut jalur evakuasi dan dilengkapi dengan rambu evakuasi yang disosialisasikan kepada seluruh warga Sekolah dan orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

Biro Administrasi Pembangunan dan PSBA UGM. (2012). *Kajian Model Sekolah Sadar Bencana di DIY*. Yogyakarta: Sekretariat Daerah Provinsi DIY.

Kusumasari, B. (2015). Women Adaptive Capacity in Post Disaster Recovery in Indonesia. *Asian Social Science*. Vol. 11, No. 12, pp. 281-289.

LIPI-UNESCO-ISDR. (2006). *Kajian Kesiapan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*. Jakarta: Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumihan LIPI.

Mulyadi, Tasril, dkk. (2010). *Cerita dari Maumere: Membangun Sekolah Siaga Bencana*. Jakarta Pusat : COMPRESS LIPI.

Tierney, K. J., Lindell, M. K., & Perry, R. W. (2001). *Facing the Unexpected: Disaster Preparedness and Response in the United States*. Washington D.C: Joseph Henry Press.

Tim Jaringan Penelitian Provinsi DIY. (2012). *Pengembangan Model Sekolah Sadar Bencana*. Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan, Setda DIY.



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**